



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 24, No. 1, APRIL 2010

ISSN - 0215-8809

☐ **USAHA KECIL BERSPEKTRUM LUAS: INDUSTRI PRIBUMI DI DAERAH YOGYAKARTA 1830-AN – 1930-AN**

Anton Haryono

☐ **HAKEKAT PENDIDIKAN SEJARAH**

H. Purwanta

☐ **PARADIGMA PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS KONSTRUKTIVISME**

Y.R. Subakti

☐ **PENELITIAN TINDAKAN KELAS DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU**

Th. Sumini

☐ **PERANAN SUTAN SYAHRIR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA (1945-1947)**

Bernarda Prihartanti

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

---

---

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/ atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/ atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di HISTORIA VITAE, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

---

### **DEWAN REDAKSI**

Pemimpin Umum/Penanggung jawab/ : Dr. Anton Haryono, M.Hum.  
Pemimpin Redaksi  
Anggota Dewan Redaksi : Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.  
Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

---

### **REDAKTUR AHLI**

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya SJ, M.A. .... Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  
Dr. S. Nawiyanto ..... Universitas Jember

---

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.  
Dra. Theresia Sumini, M.Pd.  
Drs. A.A. Padi

---

### **SEKRETARIAT ADMINISTRASI**

R. Marsidiq

---

### **ALAMAT REDAKSI**

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383  
Telegram: SADHAR YOGYA  
E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

### DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Editorial .....	iii
<i>Usaha Kecil Berspektrum Luas: Industri Pribumi di Daerah Yogyakarta 1830-an - 1930-an</i> .....	1 - 23
<i>Anton Haryono</i>	
<i>Hakekat Pendidikan Sejarah</i> .....	24 - 37
<i>H. Purwanta</i>	
<i>Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Konstruktivisme</i> .....	38 - 70
<i>Y.R. Subakti</i>	
<i>Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Profesi Guru</i> .....	71 - 91
<i>Th. Sumini</i>	
<i>Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947)</i> ....	92 - 110
<i>Bernarda Prihartanti</i>	

**USAHA KECIL BERSPEKTRUM LUAS:  
INDUSTRI PRIBUMI DI DAERAH YOGYAKARTA  
1830-AN - 1930-AN**

**Anton Haryono**

**Abstract**

*This article was discussing the development of indigenous industry in Yogyakarta region during the colonial era of 1830s - 1930s. Referring to the fact that Yogyakarta region was located in the inland Java, which was often considered as agricultural domain, the study aimed at knowing the intensity and vastness of its indigenous industrial activities. The findings of the study showed that the inland location did not hinder the intensive and extensive industrial activities, and even the industrial activities in Yogyakarta region exceeded those in other region in Java. The indigenous industry was not too marginal and its vitality or competitiveness was relatively good. The industrial sector became a solution to the problem of the decrease in farmland as the result of the growth of population.*

**Keywords:** *industry, indigenous, Yogyakarta, colonial era.*

**Pengantar**

Daerah Yogyakarta terletak di pedalaman, yakni kawasan yang sering dipahami sebagai ranah pertanian. Namun, masyarakat di daerah ini tidak hanya hidup dari pertanian, tetapi juga dari industri. Sejumlah produk industrinya telah menjadi komoditas perdagangan jauh sebelum 1830 (Carey, 1981: 5). Hubungan-hubungan dagang dengan daerah lain, termasuk dengan luar Jawa, antara lain diperankan oleh para pedagang dari Kotagede, yang pada 1830-an banyak di antara mereka memiliki kekayaan 50-60.000 gulden, setara dengan 25-30.000 pikul (1 pikul = 61,76 kilogram) beras (*Algemeen Verslag / A.V. 1836*).

Pada 1830-an, daerah Yogyakarta telah menunjukkan tanda-tanda kesuburan dalam hal pengembangan industri (*A.V. 1836*). Kesuburan ini masih terlihat secara jelas pada satu abad kemudian (1930), ketika 10,6% penduduk (dari total 1.538.868 jiwa) memperoleh

---

*Dr. Anton Haryono, M.Hum., adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

pendapatan darinya. Menarik dan penting untuk dikaji, karena persentase jumlah penekun industri di daerah Yogyakarta tadi ternyata merupakan yang paling tinggi dan jauh di atas persentase jumlah penekun industri di Jawa-Madura yang hanya mencapai 4% (Sitsen, 1937: 171-200).

Industri pribumi daerah Yogyakarta 1830-an - 1930-an juga unggul dalam hal jumlah cabang usaha. Namun, seperti yang terjadi di Jawa dan Madura, sektor industri tetap bukan merupakan arus utama kehidupan ekonomi masyarakat. Kecuali itu, sebagian besar usaha dijalankan dalam bentuk industri rumah dan industri kecil minim modal finansial dan teknologi. Dalam waktu lama, industri pribumi praktis tidak memperoleh perlindungan dari pemerintah dan harus menghadapi persaingan tajam dengan produk impor.

Studi ini akan mengkaji tentang keragaman dan dinamika industri. Pertama, sejauh mana dan dalam hal apa saja industri pribumi yang sering mendapat predikat marginal juga memiliki spektrum luas. Kedua, bagaimana sektor ini berkembang di tengah-tengah tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi produk impor. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang telah berpengaruh bagi perkembangan industri pribumi tersebut. Prestasi dan batas-batas prestasi akan dipahami berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi.

Untuk membahas persoalan-persoalan di atas, tulisan ini memakai sejumlah sumber, seperti *Algemeen Verslag* (A.V.), *Memorie van Overgave* (MvO), *Koloniaal Verslag* (K.V.), dan majalah-majalah berbahasa Belanda. Sumber penulisan juga diperoleh dari beberapa karya publikasi hasil penelitian, seperti karya Rouffaer (1904), Sitsen (1937), Wilde (1941), dan Oorschot (1956) tentang sektor industri di Jawa-Madura dan Indonesia. Karya publikasi yang memuat perkembangan industri pribumi di daerah Yogyakarta antara lain karya O'Malley (1977) dan Carey (1981). Karya O'Malley terbatas pada masa depresi ekonomi 1930-an dan merupakan studi perbandingan mengenai persoalan yang lebih luas dengan Sumatera Timur. Sementara itu, karya Carey membahas keadaan masyarakat desa Jawa menjelang Perang Diponegoro. Persoalan yang belum terjawab pada sumber-sumber itu adalah posisi atau prestasi daerah Yogyakarta dalam perkembangan industri pribumi di Jawa dan Madura.

## **Kesinambungan Dari Masa Lalu**

Kegiatan memproduksi barang telah lama berlangsung di daerah Yogyakarta. Jejak-jejaknya bisa dilacak hingga zaman Senopati pada abad ke-16 (Soepardi, 1932: 820 dan de Graaf, 1985: 282-283). Meskipun untuk kemasyurannya sendiri, Senopati adalah raja penggiat kerajinan tangan; ia juga dikenal sebagai penganjur didirikannya pengecoran besi di Batur (Klaten) untuk memproduksi mata bajak pada 1590 (Wilde, 1941: 169), yang masih hidup hingga sekarang. Pada zaman itu, pembuatan gula kelapa untuk komoditas perdagangan pun dapat ditemukan di Gunungkidul (de Graaf, 1985: 295-296).

Pada masa Sultan Agung (1613-1645), Mataram banyak melakukan perang penaklukan. Serangkaian peperangan yang berhasil dimenangkan biasanya diikuti dengan dibawanya ke Mataram ribuan orang taklukan untuk dipekerjakan di sana. Banyak di antara orang-orang taklukan yang dibawa pulang memiliki keahlian yang tinggi di bidang kerajinan dan pertukangan (de Graaf, 1986: 49), sehingga kehadiran mereka sangat mendukung bagi berkembangnya kedua bidang pekerjaan itu di Mataram. Pada awalnya, aktivitas mereka dalam memproduksi barang di tempat tinggalnya yang baru terutama untuk melayani kepentingan keraton.

Perlu diketahui, keraton selain membutuhkan barang-barang pakai kebutuhan sehari-hari yang cukup banyak bagi keluarga besar dan para pegawainya, juga berkepentingan terhadap diproduksinya barang-barang mewah. Barang-barang yang disebut terakhir, yang mahal harganya dan bernilai seni tinggi, berfungsi sebagai salah satu perangkat material bagi kultus kemegahan raja. Tidak aneh jika kemudian tenaga-tenaga terampil senantiasa dipekerjakan di istana raja. Pada eranya dulu, tenaga seperti ini mencapai ribuan orang, termasuk para wanita untuk pekerjaan dapur, pemintalan, penenunan, penyulaman, pematikan, penjahitan, dan lain-lain (Rouffaer, 1904: 16).

Sejak runtuhnya keraton Plered karena serbuan pasukan Tronojoyo pada 1677, kurang lebih selama 75 tahun daerah Yogyakarta menjadi agak jauh dari kota istana. Selama masa itu, pusat kekuasaan berada di Kartasura (1680-1746) dan kemudian di Surakarta (Ricklefs, 1991: 110-145). Namun, di daerah Yogyakarta terdapat dua kompleks makam raja yang selalu dirawat oleh pihak keraton. Untuk merawat makam raja, pihak keraton mempercayakan kepada orang-orang pilihan yang tinggal di sekitar makam. Sebagai imbalan perawatan makam,

mereka dibebaskan dari kerja wajib dan menerima sebidang tanah jabatan. Setelah merawat makam, mereka masih memiliki banyak waktu yang kemudian dipakai untuk menekuni berbagai pekerjaan tangan (Angelino, 1930: 177). Jadi, meskipun sedang jauh dari keraton, kerajinan tetap memiliki penekun di daerah Yogyakarta.

Pada periode Kartasura dan Surakarta sangat mungkin kerajinan di daerah Yogyakarta berkembang lebih baik, karena jauh dari peperangan antar faksi bangsawan istana. Seperti diketahui, pada periode itu terjadi perang-perang pergantian tahta yang destruktif; bahkan, perang suksesi yang terakhir harus diselesaikan dengan pembagian kerajaan menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta, melalui Perjanjian Giyanti pada 1755 (Ricklefs, 1974: 37-95). Dengan munculnya Kasultanan Yogyakarta, sektor kerajinan di daerah yang sedang dibahas ini kembali memperoleh kedekatannya dengan keraton, suatu institusi yang tidak pernah sepi dari kesemarakan duniawi. Tentu saja kehadiran keraton baru itu akan dapat menambah daya kembang aktivitas kerajinan dan pertukangan secara signifikan.

Raja pertama (pembangun) Kasultanan Yogyakarta, Mangkubumi atau yang kemudian bergelar Hamengku Buwana I, termasuk raja besar di antara raja-raja Mataram yang giat melakukan pembangunan (Ricklefs, 1974: 84). Pada zamannya, saling berlomba dalam kesemarakan istana antara Surakarta dan Yogyakarta tak terhindarkan; apalagi, pada masa-masa awal masih terdapat ambisi untuk menyatukan kembali kerajaan Jawa Tengah yang terbelah (Ricklefs, 1974: 96-118). Oleh karena unjuk kekuatan militer sudah menjadi masa lampau, maka kultus kemegahan yang identik dengan perikehidupan keraton kini lebih diorientasikan pada kepemilikan sarana-sarana lain dengan lebih optimal, khususnya sarana material. Akibatnya, sektor kerajinan, meskipun masih dominan dalam perspektif kepentingan keraton, memperoleh daya dorong baru.

Perlu dikemukakan juga bahwa Jawa sejak Perjanjian Giyanti 1755 adalah Jawa yang damai (Ricklefs, 1991: 151). Kedamaian ini mendukung bagi kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Setidaknya hingga awal abad ke-19 Daerah Kerajaan menikmati zaman kemakmuran. Perdagangan dengan Pantai Utara Jawa meningkat, yang komoditas jualannya antara lain: beras, tembakau, nila, kapas, benang, kain tenun, kain batik, tikar pandan, dan minyak kacang (Carey, 1981: 5). Dari sejumlah komoditas itu tampak bahwa kerajinan di Daerah Kerajaan kini tidak lagi hanya mengabdikan kepada istana, tetapi juga telah

berorientasi untuk melayani kepentingan pasar. Selain itu, dengan memperhatikan jenis-jenis barang tadi, kegiatan industri juga telah menjangkau daerah pedesaan. Dengan kata lain, semakin banyak orang tidak lagi hidup semata-mata dari hasil pertanian.

Dengan menyimak hasil penelitian Carey (1981: 11) terlihat bahwa pada awal abad ke-19, kain dan benang merupakan komoditas terpenting Daerah Kerajaan setelah padi dan tembakau. Ribuan kodi sarung warna dan selendang dari Bagelen, serta kain putih dan batik dari Yogyakarta diekspor ke Pantai Utara Jawa. Dari Yogyakarta juga diekspor ratusan pikul benang biru ke Semarang; dan, produk lainnya yang laku keras di Pantai Utara adalah kain *kelengan* (batik biru sederhana) dan kain *lurik* (Carey, 1981: 12). Sudah tentu volume produksi jauh lebih besar dari volume ekspornya, karena Daerah Kerajaan sendiri juga membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mengingat proses produksi dilakukan tanpa menggunakan mesin, maka tenaga kerja yang terserap bisa dipastikan cukup tinggi. Pengerjaannya pun sulit dipusatkan pada suatu tempat kerja tertentu, melainkan tersebar luas dalam bentuk industri rumah dan industri kecil.

Sederet cabang industri lainnya juga telah ditekuni secara dinamis pada awal abad ke-19. Cabang-cabang itu antara lain minyak kelapa, gula kelapa, nila cair, garam, dan berbagai cabang kerajinan pengolah aneka logam. Ini semua memberikan bukti tentang begitu kuatnya tradisi pertukangan dan kerajinan yang berkembang di daerah Yogyakarta. Pada awalnya kegiatan memproduksi barang terutama memang diarahkan dan demi kepentingan keraton ataupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Prinsip swasembada dalam masyarakat subsisten menghendaki demikian. Namun, seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman, kegiatan produktif tadi semakin lama semakin membuka diri terhadap permintaan pasar, terutama ketika sektor pertanian semakin tidak bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan.

### **Skala Kecil Tetapi Sangat Beragam**

Sepanjang sejarahnya, industri pribumi di daerah Yogyakarta selalu menunjukkan spektrum yang luas. Pada 1830-an, cabang-cabang usaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain: pembuatan garam, pembuatan minyak kelapa, pembuatan gula kelapa, pemintalan benang, penenunan, pematikan, pembuatan bahan pewarna kain, usaha pencelupan, pembakaran kapur, kerajinan logam

(emas, perak, tembaga, kuningan, dan besi), kerajinan kayu, kerajinan kulit, kerajinan batu, kerajinan tanah liat (genteng, batu bata, dan gerabah), serta pertukangan lain (A.V. 1836 dan 1838). Penyebutan "pertukangan lain" memberi petunjuk yang jelas tentang kegiatan industri rakyat yang bersifat aneka-ragam. Keragaman ini tersaji lebih lengkap pada Pameran Industri 1852 (A.V. 1852). Ringkasnya, dari barang-barang mewah, mahal, dan indah yang bertengger di keraton megah, yang sering menjadi pendukung bagi kultus kemegahan raja (Moertono, 1985: 72-85), hingga barang-barang amat sederhana dan murah yang berserak di dapur petani miskin.

Berdasarkan laporan-laporan umum residen bisa diketahui bahwa industri pribumi yang aneka ragam itu pada 1850-an mengalami suatu peningkatan dan semakin berkembang. Beberapa laporan umum residen mencatat mengenai ditemukannya hampir semua jenis kerajinan dalam kehidupan masyarakat dan daerah Yogyakarta tidak kekurangan tenaga cakap yang mampu bersaing dengan tenaga lain di Hindia Belanda (A.V. 1852, 1854, dan 1859). Transaksi perdagangan juga mengalami banyak peningkatan, sampai-sampai residen menyebut daerah Yogyakarta mirip sebuah pasar (A.V. 1852). Berbagai produk kerajinan sudah barang tentu memiliki kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya transaksi pasar pada 1850-an itu.

Situasi dinamis industri rakyat juga bisa ditemukan pada 1870-an, terutama usaha batik yang disebut-sebut dalam laporan residen (A.V. 1873) sangat menyibukkan banyak orang. Amat beragamnya cabang industri dan bervariasinya produk pada sejumlah cabangnya terpelihara terus pada masa-masa selanjutnya. Bahkan dalam perspektif kegiatan usaha pribumi, setidaknya berdasarkan keadaan 1930, cabang industri yang berkembang di daerah Yogyakarta merupakan yang paling beragam di Jawa dan Madura (Sitsen, 1937: 197-198). Data 1930 juga mencatat beberapa cabang industri yang tidak disebutkan pada sumber-sumber sebelumnya, seperti pembuatan rokok dan industri makanan, yang juga menyerap ribuan tenaga kerja. Dari sini terlihat betapa sektor industri telah dihidupi oleh dan memberikan kehidupan kepada banyak orang di daerah Yogyakarta.

Kepenekunan industri akan semakin tampak spektrum luasnya bila usaha-usaha jasa diperhitungkan. Salah satu usaha jasa yang tumbuh secara dinamis di daerah Yogyakarta adalah jasa angkutan. Usaha ini bermula dari kuda beban, gerobak, dan kereta kuda (A.V. 1833 dan K.V. 1892, Bijl. C. 14: 3), dan pada awal abad ke-20 mulai dilengkapi

dengan mobil sewaan, prahoto, dan bus (MvO 1934: 21). Salah satu kelompok masyarakat yang menekuninya dengan prestasi tinggi adalah orang-orang kaya Kalang sub Yogyakarta yang bermukim di Tegalendu (Nakamura, 1983: 47). Menariknya, usaha pribumi ini tidak serta merta tergusur oleh hadirnya kereta api. Setidaknya, pada awal 1890-an angkutan tradisional masih laku keras, karena dibutuhkan untuk mengangkut aneka produk tanaman ekspor dari pabrik-pabrik di tanah sewaan ke stasiun kereta api dan juga masih sering untuk mengangkut barang dagangan dari dan ke Semarang (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 3).

Bila orang Kalang sub Yogyakarta menekuni jasa angkutan, maka orang Kalang sub Surakarta (juga tinggal di Tegalendu) menekuni usaha jasa pegadaian. Sama seperti usaha jasa angkutan, usaha pegadaian yang dimulai pada peralihan abad ke-19/20 ini juga membawa keuntungan sangat besar bagi para pelakunya (Nakamura, 1983: 47). Berkembangnya jasa pegadaian memberikan bukti penguat lain tentang meningkatnya peredaran uang seiring dengan ekspansi perkebunan yang disebut-sebut oleh sejumlah sumber. Terlepas dari itu, pemahaman terhadap eksistensi dinamis usaha jasa pegadaian -dan angkutan- bisa melengkapi gambaran tentang spektrum luas industri yang dikembangkan oleh orang-orang pribumi di daerah Yogyakarta. Orang Yogyakarta tidak hanya sibuk di sawah dan di ladang, tetapi juga di rumah, di pegadaian, di pasar, dan di jalan-jalan. Sektor pertanian bukan satu-satunya sumber kehidupan, karena di balik itu terdapat sederet kegiatan produktif lainnya.

Memahami keragaman industri tidak cukup hanya dengan melihat banyaknya cabang dan bervariasinya produk pada setiap cabang usaha. Aspek-aspek lain juga perlu dipertimbangkan. Dari perspektif bahan baku misalnya, terdapat banyak cabang industri berbahan baku lokal, seperti industri penghasil garam, minyak kelapa, gula kelapa, tepung, blawu, kulit, tanduk, kayu, anyam-anyaman, batu, kapur, genteng, batu bata, dan gerabah; dan tidak sedikit pula cabang industri pengolah bahan baku impor, seperti industri tenun, batik, emas, perak, perunggu, besi, dan kaleng. Di sini terlihat jelas bagaimana sumber daya alam setempat yang berlimpah diberi nilai tambah; dan demi barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka ketiadaan bahan bakunya di daerah Yogyakarta bukan alasan untuk tidak dikerjakan. Manusia pekerja lebih mengemuka daripada manusia pemalas seperti yang sering dituduhkan.

Industri berbahan baku lokal dan industri berbahan baku impor sudah tentu memiliki tantangan yang berbeda, sehingga strategi produksi juga tidaklah sama. Kelangkaan bahan baku beberapa kali dialami oleh cabang-cabang industri berbahan baku impor, sehingga menyulitkan kegiatan usaha, terutama ketika daya beli masyarakat sedang merosot. Untuk menyasiasi modal yang sangat terbatas, beberapa cabang industri tipe ini sering membeli bahan baku secara kredit, seperti pada industri tenun dan batik (Sitsen, 1937: 149; Soerachman, 1927: 27); atau dengan menerapkan sistem daur ulang, seperti yang sering terjadi pada kerajinan emas, perak, tembaga, besi, dan batik (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2; Jasper, 1902: 217; Soerachman, 1927: 40). Bisa dikatakan ini adalah siasat yang cerdas dalam industri kecil.

Industri pribumi juga bisa dipilahkan atas dasar jenis kelamin para perajinnya. Kerajinan logam, kayu, batu, kulit, kapur, genteng, dan batu bata, cenderung dilakukan oleh laki-laki; kerajinan tenun, batik, minyak kelapa, gula kelapa, tepung, dan makanan dominan dikerjakan oleh perempuan; dan kerajinan lain, seperti anyam-anyaman, gerabah, dan payung, memperlihatkan sifat campuran (*Economisch-Weekblad*, 1941). Pada 1930-an, jumlah perajin perempuan jauh lebih besar dari jumlah perajin laki-laki, yakni mencapai sekitar 80% (Sitsen, 1937: 197-198). Komposisi mayoritas perempuan dalam industri pribumi diperkirakan telah berlangsung lama, karena cabang-cabang usaha yang dijalankan tidak banyak mengalami perubahan. Lagi pula, dalam masyarakat agraris kelompok yang terlempar terlebih dulu dari sektor pertanian -ketika luas lahan semakin tidak mencukupi- adalah kaum perempuan, sehingga tingkat kemendesakan untuk mengembangkan sektor kerajinan sebagai pekerjaan baru atau tambahan ada pada kaum perempuan.

Spektrum luas industri pribumi di daerah Yogyakarta juga bisa dilihat dari persebaran kepenekunannya. Perlu ditekankan, para perajin keraton ataupun perajin kota hanyalah sebagian dari penopang industri pribumi. Tidak sedikit usaha kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat desa, seperti industri tenun, garam, gula kelapa, minyak kelapa, anyam-anyaman, gerabah, genteng, batu bata, kapur, dan pandai besi. Bahkan, batik tulis yang telah lama ditekuni oleh para perempuan kota pun, pengerjaannya kemudian juga melibatkan para perempuan miskin di desa-desa (Angelino, 1930: 175). Dari sini terlihat jelas bahwa industri pribumi tidak hanya bisa dijumpai di kota, tetapi dengan mudah juga bisa ditemukan di pelosok-pelosok desa, tak terkecuali di dataran-

dataran tinggi, yang hingga kini masih setia memproduksi –misalnya– gula kelapa dan aneka produk olahan khas pegunungan.

Keragaman industri juga bisa dipetakan dari motivasi seseorang dalam memproduksi barang. Sejumlah besar orang melakukan kegiatan itu tidak lebih sebagai pekerjaan sampingan demi memperoleh tambahan pendapatan, seperti terlihat pada industri tenun sebelum revitalisasi pada 1930-an dan anyam-anyaman (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Cukup banyak pula perajin yang menekuninya sebagai pekerjaan pokok; dan usaha ini sebagian besar dalam bentuk industri kecil. Batik merupakan contoh usaha yang bergerak dari industri rumah hingga industri besar (Rouffaer, 1904: 23-25). Sektor tenun yang dalam waktu lama nyaris sebagai usaha sampingan (industri rumah), pada 1930-an telah ada pula yang menjelma dalam bentuk perusahaan kapitalistik dengan peralatan yang lebih baik (MvO 1934: 526). Sekali lagi, dari segi motivasi dan kemampuan untuk menjangkau, praksis industri rakyat juga menunjukkan keragamannya.

Lebih lanjut, tingkat keluasan daerah penjualan juga bisa dipakai untuk membedakan antara cabang industri yang satu dengan cabang industri lainnya. Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikutip, anyam-anyaman, perabotan dari kayu, dan barang-barang dari tanah liat, dapat dicontohkan sebagai produk yang pemasarannya cenderung terbatas di daerah Yogyakarta sendiri. Sementara itu, produk tenun, batik, tembaga, perak, minyak kelapa, dan gula kelapa mampu menembus pasar-pasar di karesidenan lain. Bahkan, batik tulis dan benda-benda dari perak pernah memiliki prestasi fenomenal, yakni dikenal luas hingga mancanegara. Daya jangkau pasar yang berbeda-beda tadi tentu saja akan berpengaruh terhadap daya hidup masing-masing cabang industri.

Tidak kalah penting adalah usaha untuk memahami keragaman industri ditinjau dari kelas sosial konsumennya. Kelas sosial konsumen kain tenun desa, misalnya, berbeda dengan kelas sosial konsumen batik tulis. Demikian pula, konsumen batik tulis dan konsumen batik cap, apalagi batik cap yang paling kasar, bisa menunjukkan kelas sosial yang tidak sama. Sama-sama perabotan dapur, barang-barang dari tanah liat akan memiliki kekuatan mengalir ke kelas bawah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan barang-barang dari tembaga. Gamelan perunggu tentu akan menemukan konsumennya pada orang-orang kaya. Dapatlah dikatakan bahwa berkat keragaman cabang dan produknya yang sangat tinggi, industri pribumi di daerah Yogyakarta mampu untuk melayani

permintaan semua lapisan masyarakat, dari raja di istana hingga buruh tani di desa-desa miskin.

### **Arti Penting Industri**

Kegiatan industri pribumi yang meningkat dan meluas sejak 1830-an bisa dilihat dari data-data sebagai berikut. Pada 1836, ketika jumlah penduduk di daerah Yogyakarta baru tercatat 306.973 jiwa (A.V. 1836), terdapat 500 keluarga penekun usaha tenun di Kabupaten Sleman, 3.000 keluarga pembuat minyak kelapa dan 100 keluarga pembuat nila cair di Kabupaten Kalasan, 800 keluarga penekun usaha pencelupan di seluruh daerah, 1.500 keluarga pembuat gula kelapa di Kabupaten Bantul dan Sleman, dan 773 keluarga pembuat garam di Pantai Selatan (Carey, 1981: 13). Data ini bukanlah gambaran dari seluruh aktivitas industri, tetapi sekedar contoh dari usaha-usaha yang menonjol dan ditekuni sebagai spesialisasi. Contoh itupun terbatas di daerah inti, atau tidak termasuk Kulonprogo dan Gunungkidul. Artinya, jumlah orang yang menekuni sektor industri, termasuk para perajin paruh waktu, lebih besar lagi.

Bila menilik jumlah penduduk waktu itu, jumlah penekun industri pada data ilustrasi, 6.673 keluarga, pun sudah menunjukkan angka yang agak besar. Bila satu keluarga rata-rata terdiri dari 4 orang, maka jumlah penduduk tersebut setara dengan 76.743 keluarga. Dengan demikian, jumlah keluarga penekun industri pada data ilustrasi saja telah mencapai 8,7% dari jumlah total keluarga. Jumlah 91,3% sisanya tidak serta merta semua hidup dari sektor pertanian, karena masih ada pekerjaan lain, yakni sektor publik, perdagangan, jasa, dan industri yang tidak terdata. Selain itu, tentu saja terdapat keluarga-keluarga yang tidak produktif lagi karena faktor usia. Bila usaha pencelupan terdata 800 keluarga, maka bisa diperkirakan jumlah orang yang terserap ke dalam kerajinan batik, sebagai contoh, tentu jauh lebih besar.

Meskipun data tidak cukup lengkap untuk membuat gambaran yang pasti, Daerah Yogyakarta tidak hanya berdenyut karena sektor pertanian. Pada 1890, dari 174.262 pemegang pekerjaan, yang tercatat hidup dari usaha pertanian hanya 44.642 jiwa atau 25,6% (K.V. 1892: Bijl. A: 14-15). Jumlah ini mungkin sekali hanya mencakup petani yang semata-mata hidup dari sektor pertanian, mengingat klasifikasi data pada sumber terkatip terlalu banyak (26 jenis pekerjaan), sehingga petani yang kebetulan memiliki kolam ikan atau beternak dan berjualan ternak, misalnya, tidak dimasukkan ke dalamnya. Namun, andaipun

jumlah petani harus diperbesar, data *Koloniaal Verslag* (K.V.) itu tetap bisa memberikan gambaran tentang besarnya proporsi orang yang hidup dari ekonomi non-pertanian, yang salah satunya adalah sektor industri.

Terdapat sejumlah kategori pada K.V. 1892 yang bisa dimasukkan ke dalam sektor industri, yakni pembuat garam, pemilik dan pengemudi gerobak, pandai emas dan perak, perajin senjata, perajin mebel, perajin payung, dan tukang cat biru, yang jumlah totalnya 5.675 jiwa. Perajin tenun, batik, anyaman, tembaga, besi, kaleng, tanduk, kulit, batu, batu bata, genteng, gerabah, gula kelapa, dan minyak kelapa rupanya dimasukkan dalam kategori "tukang dan pekerja tangan lain, termasuk pemborong, kuli, dan lain-lain", yang jumlahnya mencapai 66.049 jiwa. Jumlah tadi bukan sepenuhnya milik sektor industri, tetapi jumlah perajin diperkirakan cukup besar, karena cabang-cabang industri yang diwadahi dalam kategori itu beranekaragam. Lagi pula, tidak sedikit cabang industri yang ditekuni secara luas dan daya serap tenaga kerjanya lebih tinggi dari cabang-cabang industri yang terdata eksplisit, seperti industri tenun, batik, dan anyam-anyaman.

Tingginya persentase jumlah orang pribumi penekun sektor industri terlihat agak jelas pada keadaan 1930. Dari total jumlah penduduk pada waktu itu (1.538.868 jiwa), 17,7% hidup dari sektor pertanian dan 10,6% dari sektor industri (Sitsen, 1937: 197-198). Terlihat, proporsi antara penekun pertanian dan industri tidak terlalu timpang, hanya terpaut 7,1%. Menariknya lagi, persentase jumlah penekun sektor industri dari total penduduk tadi merupakan yang paling tinggi di Jawa dan Madura. Pada waktu itu, jumlah penekun industri di Jawa-Madura sendiri hanya 4% dari total penduduk (Sitsen, 1937: 171-198), sehingga capaian daerah Yogyakarta sebesar 10,6% cukup fenomenal. Tradisi kerajinan yang telah lama terbangun, bahkan akar-akar historisnya bisa dilacak hingga zaman Senopati, kiranya memiliki kontribusi yang signifikan. Selain itu, seperti akan terbukti di belakang, banyaknya penekun industri berkaitan dengan persoalan kependudukan.

Di kawasan subur dan padat penduduk yang kini menjadi Daerah Tingkat II Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, pada 1930 jumlah orang yang bekerja di sektor industri mencapai 13,7% dari total penduduk. Padahal persentase jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian hanya tercatat 13,4%. Artinya, di kawasan subur tadi jumlah penekun industri telah bisa melampaui jumlah penekun pertanian. Sementara itu, di Kabupaten Kulonprogo, jumlah orang yang bekerja di

sektor industri sebesar 11,3% dan di sektor pertanian sebesar 23,7%; dengan kata lain, sektor pertanian masih menunjukkan dominasinya. Dominasi sektor pertanian yang lebih menyolok terjadi di Kabupaten Gunungkidul, suatu wilayah yang paling jarang penduduknya. Di kabupaten ini jumlah penekun sektor industri hanya tercatat 1,5%, sedangkan sektor pertanian 24,6%. Berdasarkan analisis data, terdapat hubungan erat antara kepadatan penduduk dan pengembangan industri. Makin padat penduduknya, makin banyak orang bertekun pada sektor industri.

Bukan faktor kebetulan bila daerah Yogyakarta yang berpenduduk padat, bahkan terpadat di Jawa-Madura (Sitsen, 1937: 197-198), memiliki persentase jumlah penekun industri (dari total penduduk) yang tertinggi dan jauh di atas rata-rata. Bukan kebetulan pula apabila di kawasan terpadat penduduknya (Sleman, Yogyakarta, dan Bantul) proporsi jumlah penekun industri dan penekun pertanian berimbang. Bisa dikatakan, di daerah Yogyakarta, sektor industri telah menjadi solusi bagi masalah krusial semakin tidak mencukupinya lahan pertanian seiring dengan penambahan penduduk. Tradisi memproduksi barang yang telah lama terbangun merupakan keuntungan tersendiri, karena banyak orang bisa mentransformasikan kegiatan pra-pasarnya ke kegiatan produktif baru berorientasi pasar. Tanpa pengembangan industri, bisa jadi migrasi sejak awal abad ke-20, yang sesungguhnya sarat dengan kepentingan kolonial, akan berlangsung lebih masif.

Selain tingkat kepenekunan yang tinggi, sejumlah cabang industri pribumi di daerah Yogyakarta pernah memiliki reputasi pasar yang baik. Garam dari Pantai Selatan, yang pada 1830-an telah dibatasi pemerintah kolonial hanya boleh dikonsumsi di daerah Yogyakarta sendiri (A.V. 1836), pada awal 1890-an masih banyak dijual secara illegal di daerah perbatasan Kedu (K.V. 1892, Bijl. C. 13: 4) dan Surakarta (K.V. 1892, Bijl. C. 15: 5). Pada 1836, ribuan pikul minyak kelapa (1 pikul = 61,76 kg) berhasil dikirim ke karesidenan lain dan telah menghasilkan uang yang nilainya setara dengan harga 31.500 pikul beras (A.V. 1836). Eksportasi komoditas ini terus berlangsung, dan baru pada awal 1890-an mulai surut seiring dengan meningkatnya eksportasi kopra dan gula kelapa (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Eksportasi gula kelapa sendiri telah bisa ditemukan pada 1830-an; dan seratus tahun kemudian, bersama-sama dengan minyak kelapa juga masih ditekuni di hampir semua kabupaten (Sitsen, 1937: 197-198).

Sejak awal pembuatan kain tenun telah terganggu oleh masuknya kain impor (A.V. 1836). Namun, usaha ini sedikit banyak dibentengi oleh tradisi. Pada 1870-an, meskipun arus masuk kain impor cukup besar, industri tenun masih banyak ditekuni di desa-desa (A.V. 1874-1879). Masyarakat pada waktu itu memang menyukai kain putih impor, tetapi untuk bahan pakaian mereka lebih mengutamakan kain batik, ikat kepala batik, atau *kain lurik* buatan pribumi (A.V. 1874). Hal ini memberi petunjuk bahwa kain impor mendesak kain pribumi terutama pada kain putih, yang sesungguhnya dalam jumlah besar untuk bahan baku batik. Sementara itu, kain warna impor tidak bisa segera menggeser kain *lurik* warisan masa lalu yang khas. Bahkan pada awal 1890-an, kain *lurik* Yogyakarta masih banyak diminati oleh masyarakat di Karesidenan Kedu dan Madiun berkat mutu dan ketahanannya yang baik (K.V. 1892, Bijl. C. 13: 2 dan 16: 3). Bisa dikatakan, tradisi berpakaian ala Jawa sedikit banyak berkontribusi bagi tetap bertahannya industri tenun, kendatipun vitalitasnya menurun.

Vitalitas industri tenun yang menurun semakin tampak nyata pada periode Perang Dunia I. Pada masa ini harga bahan-bahan baku impor, termasuk benang, melonjak ("Achterlijkheid", 1926: 54). Bila dulu benang impor yang murah harganya merupakan fasilitas tersendiri bagi industri tenun, kini kelangkaannya di pasar, karena arus masuknya mengkerut, merupakan pukulan yang menyakitkan. Untuk memulihkan keadaannya yang menyedihkan, pada paruh kedua 1920-an mulai dilakukan program penggiatan industri tenun, sehingga pada 1930 puluhan ribu orang desa menekuninya kembali dalam bentuk industri rumah (Sitsen, 1937: 197-198). Revitalisasi industri tenun menemukan momentum terbaiknya pada 1930-an. Hal ini antara lain karena dorongan kuat dari pemerintah (MvO 1934: 525) dan begitu mendesaknya masyarakat untuk memperoleh uang kontan di zaman *meleset* (O'Maley, 1977: 192-193).

Dibandingkan dengan industri tenun, industri batik memiliki nasib yang lebih baik, bahkan bisa disebut sebagai cabang industri yang cukup fenomenal. Pada awal abad ke-20, Yogyakarta, bersama-sama Surakarta, masih bisa mempertahankan keunggulannya untuk menghasilkan batik yang paling indah, paling asli, dan paling aristokratis, yang tetap dicari oleh semua pembesar pribumi di Jawa (Rouffaer, 1904: 27). Eksportasi ke daerah lain yang telah berlangsung jauh sebelum Perang Diponegoro (Carey, 1981: 11) terus dilakukan dalam rentang waktu yang panjang. Hingga menjelang Perang Dunia I,

industri batik, dalam menghadapi kain impor, berdiri jauh lebih kuat daripada industri tenun (Koperberg, 1922: 148). Pada awal abad ke-20 Rouffaer (1904: 27) pernah mengemukakan bahwa setiap orang pribumi yang mampu membayar akan tetap memilih kain batik tulis daripada batik cap, dan batik cap daripada kain cetak dan kain warna buatan pabrik Eropa. Se jauh uang dimiliki, kemahalan harga kain batik tidak menjadi persoalan.

Kiranya menarik untuk melihat sejenak munculnya batik cap. Dari segi mutu, batik cap lebih rendah bila dibandingkan dengan batik tulis. Namun, bila ditinjau dari sisi lain, munculnya batik cap bisa dipahami sebagai inovasi besar. Pengerjaannya jauh lebih cepat dan bisa dilakukan dalam jumlah besar, sehingga harganya bisa ditekan jauh lebih rendah daripada harga batik tulis. Oleh karena itu, sesungguhnya batik cap memiliki fungsi strategis untuk memperluas segmen pasar batik. Apalagi, batik cap bisa dibuat dalam tiga jenis mutu, yakni halus, sedang, dan kasar (Soerachman, 1927: 12), sehingga bisa menjangkau banyak lapisan sosial konsumen. Pada masa-masa sulit, ketika uang tidak mencukupi untuk membeli batik tulis, seseorang masih bisa membeli batik cap.

Pada awal 1870-an, pembuatan batik cap telah banyak ditekuni di daerah Yogyakarta, yang sebagian dari produknya diekspor ke daerah lain (Rovers, 1873: 425). Rupa-rupanya, arus deras kain impor pada 1870-an dan disebut-sebut kain putihnya amat disukai, antara lain berkaitan dengan berkembangnya industri batik cap. Apabila hal ini benar, maka bisa dikatakan bahwa dengan bahan baku kain putih impor, batik cap merupakan alat ampuh bagi industri batik untuk bisa bersaing dengan kain warna impor. Selain itu, tanpa batik cap, industri batik di daerah Yogyakarta tidak pernah akan mendapatkan pasar yang sedemikian luas dan mampu menjangkau banyak lapisan sosial sekaligus. Oleh sebab itu, fenomenalitas industri batik Yogyakarta tidak hanya mengait dengan batik tulisnya, tetapi juga dengan batik capnya.

Selama Perang Dunia I industri batik mengalami kesulitan dalam pengadaan kain putih dan bahan pewarna. Selain melambungnya harga bahan baku, pada waktu itu daya beli masyarakat merosot, sehingga banyak perusahaan batik besar mengerut dan pemodal-pemodal kecil gulung tikar ("*Achterlijkheid*", 1926: 54). Pada pasca perang industri batik bangkit kembali, mengintegrasikan pusat-pusat batik di kota dengan para perajin-pekerja borongan di desa-desa, bahkan melibatkan pula desa-desa di luar daerah Yogyakarta (Angelino, 1930: 176-183).

Pada 1930, puluhan ribu tenaga kerja terserap kembali ke dalamnya (Sitsen, 1937: 197-198). Hanya saja, selama krisis ekonomi, nasib industri batik justru berkebalikan dengan industri tenun. Selain karena daya beli masyarakat sedang melorot, pada 1934 pemerintah membatasi kain impor -termasuk kain putih- untuk melindungi industri tenun (Oorschot, 1956: 45; MvO 1939: 219). Setelah krisis usai, industri batik membaik dan mampu melakukan eksportasi lagi (Davis, 1941: 49).

Cabang industri yang juga memiliki reputasi sangat baik adalah industri perak dan emas, khususnya yang berpusat di Kotagede. Sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi pada paruh kedua 1880-an, industri barang-barang dari logam mulia mengalami kemerosotan (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Namun, pada awal abad ke-20 industri ini bangkit kembali dan produk-produknya yang sangat halus dan kaya desain asli dikagumi di seluruh penjuru Jawa (Nakamura, 1983: 45). Tidak jelas kapan mulainya, pada 1922 jumlah penekun industri logam mulia menurun dibandingkan dengan keadaan pada awal abad ke-20 (Mook, 1958: 289).

Ketika disadari bahwa orang-orang pribumi tidak bisa lagi dijadikan tumpuan, sejumlah pengusaha perak mulai membuat barang-barang yang disukai oleh wisatawan dan orang-orang Eropa (Soepardi, 1932: 820-821). Dengan ditemukannya pasar baru di luar lingkungan pribumi ini, pada 1928 industri perak mulai bangkit kembali untuk yang kesekian kalinya ("*Kunstambachtwerk*", 1941: 215). Sejak saat itu industri perak di Kotagede terus membesar dan pada masa-masa terbaiknya (1935-1938) terdiri atas 70 perusahaan dengan 1400 pekerja, yang setiap tahun bisa memproses 25.000 kilogram perak (Nakamura, 1983: 114). Berkat pasar baru dan keunggulan mutu produknya, industri perak tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi 1930-an, bahkan mampu melahirkan raja-raja uang (Nakamura, 1983: 114).

Kotagede sendiri memiliki fenomenalitas yang pantas untuk dicatat. Historitas keperajinannya sudah bisa ditemukan pada zaman Senopati dan masih bisa dijumpai pada masa sekarang ini. Pada masa kolonial, bekas kota istana ini merupakan pusat industri dan perdagangan yang terkemuka. Di kota ini juga lahir juragan-juragan Jawa kaya yang dari waktu ke waktu kekayaan mereka selalu menimbulkan kekaguman bagi banyak orang. Di Kotagede, justru sektor pertanian dan bukannya sektor industri yang berada pada posisi marginal. Pada 1830-an reputasi besar para pedagang-pengusaha Kotagede telah tercatat dalam laporan tahunan residen. Selain jaringan

perdagangannya yang begitu luas, pada waktu itu banyak di antara mereka kekayaannya mencapai 60.000 gulden, saat harga satu pikul beras hanya dua gulden (A.V. 1836). Dengan kata lain, raja-raja uang pada 1930-an, seperti dikatakan oleh Nakamura, bukanlah fenomena baru bagi Kotagede. Sudah sejak lama Kotagede memiliki nama besar berkat talenta, semangat kerja, dan kekayaannya yang besar.

### **Realitas Pelingkup**

Perkembangan industri seperti telah dibahas pada bagian depan memperoleh daya dorong yang besar dari proses moneterisasi. Meskipun jauh sebelum 1830 daerah Yogyakarta sudah mengenal ekonomi uang (Carey, 1981: 13-14), akan tetapi pada periode selanjutnya penyewaan tanah mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga mengalami peningkatan yang tajam (Houben, 2002: 660-661). Bahkan Houben (2002: 665) menegaskan, pada periode 1830-1870 ekonomi Daerah Kerajaan sudah termoneterisasi dalam waktu yang jauh lebih cepat dari yang terjadi di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Keadaan ini tentu saja sangat kondusif bagi berkembangnya usaha-usaha produktif yang berorientasi pada pasar.

Oleh karena setelah 1870 perkebunan Barat terus meluas, maka uang yang mengalir ke lingkungan pribumi semakin lama juga semakin besar. Pada awal 1890-an institusi perkebunan di daerah Yogyakarta setiap tahunnya mengeluarkan uang sebesar 1,5 - 2,0 juta gulden hanya untuk upah buruh pabrik dan pembelian keranjang gula (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Bila uang sewa tanah diperhitungkan, maka jumlahnya akan jauh lebih besar. Beberapa tahun sebelum krisis ekonomi 1930-an, uang yang mengucur dari perusahaan-perusahaan gula saja setiap tahunnya sekitar 8,3 juta gulden (O'Malley, 1977: 190). Sekali lagi, meningkatnya peredaran uang merupakan rangsangan tersendiri bagi sektor industri. Tidak boleh diabaikan pula, meningkatnya kemakmuran di daerah *gubernemen*, seperti yang terjadi pada periode 1830-1880-an (Fernando, 1993: 96-100), kiranya juga penting bagi perkembangan sektor industri di daerah Yogyakarta, karena dalam rentang waktu yang panjang sejumlah produknya juga banyak diekspor ke sana. Perlu diketahui bahwa proses moneterisasi yang semakin menguat juga terjadi di daerah yang dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial itu.

Selain mengucurkan uang, institusi perkebunan merupakan salah satu konsumen bagi sejumlah produk industri pribumi.

Pembangunan infrastruktur yang mengait dengannya, yang dilakukan oleh pemerintah baik di daerah Yogyakarta maupun di Jawa pada umumnya merupakan kemudahan tersendiri bagi mobilitas barang dan manusia. Namun, institusi perkebunan juga memiliki andil bagi rendahnya formasi modal di kalangan rakyat. Sebelum reorganisasi agraria pada 1918, di tanah-tanah sewaan, petani –seperti sebelumnya– selain mengerjakan tanah untuk bagiannya (2/5), juga harus menggarap tanah jatah *bekel* (1/5) dan tanah untuk tanaman ekspor (2/5) yang ditentukan sepihak oleh perkebunan tanpa dibayar (O'Malley, 1977: 169). Sebagian besar hasil dari jerih payah petani justru mengalir ke pihak-pihak yang merasa berhak atas tanah (raja, bangsawan, *bekel*, ataupun pengusaha perkebunan). Tidak aneh jika industri rakyat yang berkembang sebagian besar tetap dalam bentuk industri rumah dan industri kecil minim modal finansial dan teknologi, bukan pertamanya sebagai investasi kapital, tetapi sebagai bagian dari perjuangan hidup dalam mengatasi kesulitan.

Seperti telah diuraikan pada bagian depan, keraton memiliki peran yang sangat penting bagi berkembangnya aneka bentuk kerajinan. Dalam waktu lama, keraton merupakan patron sekaligus konsumen potensial, penjaga tradisi, dan sumber referensi sosio-kultural bagi banyak orang Jawa. Keraton secara nyata juga telah menunjukkan tanggungjawabnya dalam pembangunan infrastruktur yang kondusif bagi aktivitas industri. Namun, konsep “rakyat untuk penguasa” yang diintrodusir dalam tata kuasa feodal kiranya merupakan perintang kuat bagi proses pemajuan usaha ekonomi rakyat dengan lebih optimal. Selain itu, para petinggi pribumi tidak memanfaatkan kekayaan mereka hanya untuk membeli produk yang dihasilkan rakyatnya sendiri. Perilaku konsumtif mereka juga diarahkan untuk pemenuhan barang-barang mewah dari luar negeri, bahkan dalam skala yang menguras kekayaan (Houben, 2002: 306, 349-350, dan 679) dan memerosotkan vitalitas sejumlah industri pribumi (s-Gravesande, 1914: 135 dan Resink-Wilkens, 1923: 52).

Sementara itu, pemerintah kolonial terlalu asyik untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai pasar bagi produk-produk manufaktur luar negeri, khususnya dari negeri induk. Pemikiran ke arah pengembangan industri memang dilakukan pada saat-saat krisis, tetapi lebih banyak menimbulkan polemik daripada realisasi yang konsisten (Oorschot, 1956: 18-37). Sebelum 1930, serangkaian pameran industri yang pernah dilakukan oleh lembaga kolonial ataupun penerangan dan

pendampingan oleh *Afdeeling Nijverheid* sangat berharga. Namun, peran pemerintah kolonial baru akan tampak lebih tegas seiring dengan terjadinya depresi ekonomi dunia. Sejak saat itu, berbagai bentuk penyuluhan, penggiatan, pendampingan, dan bantuan dari organ pemerintah kolonial dan pribumi terbukti mampu menopang usaha-usaha revitalisasi industri di daerah Yogyakarta (MvO 1934: 525-532 dan Davis, 1941: 45-56).

Pelingkup lain yang berpengaruh terhadap perkembangan industri pribumi di daerah Yogyakarta adalah pedagang dan pengusaha asing, serta industri pribumi di daerah lain. Berkat modal usaha yang lebih besar, pedagang dan pengusaha asing merupakan kompetitor tangguh. Mereka juga bertindak sebagai penggelontor produk-produk manufaktur impor yang lebih murah harganya, sehingga ruang gerak produk pribumi terbatas. Namun, pada sisi lain terdapat di antara mereka orang-orang yang turut mendinamisasikan industri pribumi berkat perannya sebagai pemasok bahan baku dan penyalur produk jadi hingga luar negeri, seperti yang dilakukan oleh para pedagang Cina dan Arab dalam kasus industri batik (Soerachman, 1927: 27-40). Sementara itu, industri pribumi di daerah lain secara jelas merupakan kompetitor.

### **Kesimpulan**

Lokasi geografis pedalaman samasekali tidak menghalangi bagi kegiatan industri yang bersifat intensif dan ekstensif. Justru di daerah Yogyakarta marginalitas industri berada pada tingkat paling rendah di Jawa-Madura, baik ditinjau dari segi jumlah tenaga kerja yang terserap, keragaman cabang usaha dan produk yang dihasilkan, maupun dari segi penetrasi pasarnya. Bahkan, di kawasan subur padat penduduk (Sleman, Yogyakarta, dan Bantul), kegiatan industri -setidaknya pada akhir 1920-an- tidak bisa dikatakan marginal. Di lokalitas-lokalitas tertentu, teristimewa di Kotagede, sektor industri -dan perdagangan- mampu menjadi arus utama kehidupan ekonomi masyarakat.

Industri pribumi di daerah Yogyakarta pada 1830-an - 1930-an memiliki spektrum luas. Cabang-cabang usaha yang dikembangkan amat banyak dan menunjukkan keragaman dalam hal bahan baku, penekun, lokasi kegiatan, skala usaha, tipologi produk, pasar, dan hasil usaha. Spektrum luasnya diperkaya oleh usaha jasa transportasi dan pegadaian yang telah memberi kemakmuran khusus bagi sejumlah pengusahanya. Di balik lapisan tebal unit-unit usaha subsistensif, terdapat unit-unit usaha kapitalistik yang sangat dinamis.

Kegiatan industri yang sejak 1830-an makin intensif dan ekstensif merupakan kelanjutan dari tradisi memproduksi barang yang telah lama terbangun. Ketika penambahan penduduk telah mengakibatkan semakin tidak mencukupinya lahan pertanian, kegiatan industri menjadi salah satu solusi penting bagi keluarga petani lahan sempit ataupun angkatan kerja yang tidak lagi tertampung pada sektor pertanian. Daya dorong internal ini bersinergi dengan rangsangan-rangsangan eksternal, yakni semakin meningkatnya peredaran uang dan membaiknya infrastruktur hasil sampingan dari usaha kapitalistik perkebunan.

Kelangkaan modal finansial tidak selamanya menghalangi kegiatan industri yang intensif dan ekstensif. Kelangkaan pada aspek ini mendapat kompensasi pada kepemilikan modal material berupa sumber daya alam setempat yang berlimpah dan modal kultural berupa tradisi kerajinan dan orientasi produksi untuk melayani pasar yang telah lama terbangun. Sumber daya alam menyajikan bahan-bahan baku berlimpah dan murah, bahkan banyak yang bisa diperoleh secara gratis. Sementara itu, tradisi industri yang telah lama berkembang merupakan referensi yang mudah diserap oleh para penekun baru.

Industri dengan peralatan amat sederhana tidak menghalangi bagi langkah-langkah inovatif, terutama dalam rangka menjawab tantangan pasar. Dari sini daya desak produk massal impor bisa dihambat, dan daya desak itu ternyata tidak sekuat seperti yang selama ini dipahami. Selain itu, produk impor yang lebih murah tidak hanya berposisi sebagai pengganggu, karena banyak di antaranya berfungsi sebagai bahan baku bagi sejumlah cabang industri penting, termasuk bagi cabang-cabang industri yang erat kaitannya dengan aktualisasi budaya. Dengan bahan baku impor, sejumlah produk pribumi terbukti mampu melawan produk impor saingannya.

Keraton, pemerintah kolonial, perkebunan Barat, serta industri dan perdagangan non-pribumi merupakan institusi-institusi pelingkup yang berpengaruh bagi perkembangan industri pribumi di daerah Yogyakarta. Kesemuanya memiliki peran berwajah ganda; pada aspek-aspek tertentu memiliki kekuatan mendinamisasikan, tetapi pada aspek-aspek lainnya –disadari atau tidak– kontraproduktif bagi pengembangan yang lebih optimal. Realitas kegiatan industri yang intensif dan ekstensif, tetapi yang pelaksanaannya sebagian besar tetap dalam bentuk industri rumah dan industri kecil minim modal finansial, dalam banyak hal merupakan akibat dari pengaruh eksternalitas yang

berwajah ganda itu. Jangkauan pengembangan lebih lanjut juga dihadang oleh eksistensi industri pribu-mi di daerah lain.

Bagi masyarakat di daerah Yogyakarta, kegiatan industri yang kini diklasifikasikan sebagai UMKM secara kuat telah menjadi kebudayaan. Pada masa krisis, revitalisasi mengenainya tidak sulit dilakukan, apalagi jika tersedia dinamisator ekstra individual dan supra lokal. Yogyakarta kontemporer bisa merancang arah pengembangannya lebih optimal dari perspektif statusnya sebagai Daerah Tujuan Wisata ataupun Daerah Istimewa yang sedang diributkan. Satu syaratnya, yakni komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan penggiatan dan pemajuan melalui langkah-langkah komprehensif seperti pernah terjadi pada 1930-an. Tentu saja, kebijakan-kebijakan ekonomi pro-rakyat dari pemerintah pusat sangat diharapkan.

#### **Daftar Rujukan**

- "Achterlijkheid Jogjasche kunstnijverheid", 1926, dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Zesde Jaargang.
- Algemeen Jaarlijks verslag van de Residentie Djocjokarta (A.V.) over het jaar 1836.* ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het jaar 1838.* ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Alegemeen Verslag van de Residentie Djocjokarta (A.V.) over het jaar 1840.* ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1852.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 4c.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1854.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 4e.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1859.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 4j.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1873.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.13.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1874.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.14.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1875.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.19.

- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1876.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.18.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1877.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.17.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1878.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.16.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het jaar 1879.* ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.20.
- Angelino, P. de Kat. 1930. *Batikrapport II: Midden Java.* Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Burger, D.H. 1939. *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer.* Wageningen: H. Veenman & Zonen.
- \_\_\_\_\_. 1957. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I.* Djakarta: J.B. Wolters.
- Carey, Peter B.A. 1981. "Waiting for the Ratu Adil ('Just King'): The Javanese Village Community on the Eve of the Java War (1825-30)". Makalah pada Second Anglo Dutch Conference on Comparative Colonial History 23 - 25 September, Leiden.
- Davis, F.J.H. 1941. "De buitengewesten als afzetgebied van Javaasche industriegoederen en als vestiginggebied van de nijverheid" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer, Mei.
- Fernando M.R. 1993. "Growth of Non-Agricultural Indigenous Economic Activities in Java, 1820 - 1880" dalam J. Thomas Lindblad (ed.). *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia.* Leiden: Programme of Indonesian Studies.
- Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy.* Cambridge: The University Press.
- Graaf, H.J. de dan Th.G.Th. Pigeaud. 1985. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram.* Jakarta: Grafitipers.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung.* Jakarta: Grafitipers.
- Houben, J.H. Vincent. 2002. *Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870.* Yogyakarta: Bentang.

- Koloniaal Verslag 1892. Bijlage A. "Beroepen en bedrijvend door Inlanders en Vreemde Oosterlingen, volgens de over 1890 verzamelde opgaven".
- Koloniaal Verslag 1892. Bijlage C, "Overzichten betreffende den economischen toestand van den verschillende gewesten van Java en Madoera", untuk nomor-nomor sbb: 13. Kedoe, 14. Djogjokarta, 15. Soerakarta, dan 16. Madioen.
- Koperberg, S. 1922. "De Javaansche batikindustrie" dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Jaargang 2.
- "Kunstambachtwerk", 1941, dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer.
- Memorie van Overgave van den Afredenden Gouverneur van Jogjakarta H.H. de Cook (MvO) 1934. ANRI. Microfilm, Seri 2e, Film 8.
- Memorie van Overgave van J. Bijleveld, Gouverneur van Jogjakarta 1934-1939. ANRI. Microfilm, Seri 2e, Film 8.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mook, H.J. van. 1958. "Kuta Gede" dalam W.F. Wertheim *et al.* *The Indonesian Town Selected Studies on Indonesia*. The Hague: W. van Hoeve Ltd.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- O'Malley, William J. 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930's". Thesis Ph.D. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Oorschot, H.J. 1956. *De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesia*. Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve - 's-Gravenhage.
- Prawirodipoero, Soepardi. 1932. "Ontwikkeling der zilverwerk industrie te Kotta-Gedeh" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*. Eerste Jaargang, No. 20, 18 November.
- Resink-Wilkens, A.J. 1923. "De verwording in de Inlandsche kunstnijverheid", dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java-Instituut*, Nummer 2.

- Ricklefs, M.C. 1974. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. London: Oxford University.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rouffaer, G.P. 1904. *De voornaamste industrieën der Inlandsche bevolking van Java en Madoera*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Rovers, J.L. 1873. "Bijdrage tot de kennis der Inlandsche katoenindustrie op Java" dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Deel XVIII.
- S'Gravesande, Storm van. 1914. "Het smeden van edele wapens met pamorversiering", dalam *Het Nederlandsche Indie Huis, Oud, en Nieuw*, 1 - 2.
- Sitsen, P.H.W. 1937. "De kleine nijverheid in Inheemsche sfeer en hare expansiemogelijkheden op Java" dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Jaargang 17.
- Soerachman. P. 1927. *Het batikbedrijf in Vorstenlanden*. Weltevreden: Dept. van Landbouw, Nijverheid, en Handel.
- Wilde, C.J.M. Kretschmer de. 1941. "De kampong aan den loopende band" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer, Mei.

~~~~~